



**Pendampingan Pengembangan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.**

***Assistance in the Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Business
Units in Padangan Village, Ngantru District, Tulungagung Regency***

Ahmad Syaickhu^{1*}, Purwanto²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Tulungagung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: syaickhu@staidhtulungagung.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 17 Oktober 2025;

Revisi: 21 November 2025;

Diterima: 17 Desember 2025;

Terbit: 19 Desember 2025

Keywords: BUMDes; Community Empowerment; Islamic Economic; Local Potential; Rural Economy.

Abstract This community service program aims to strengthen institutional capacity and develop the business units of the Padangan Village-Owned Enterprise (BUMDes) through enhanced managerial capabilities, business innovation, and enhanced digital marketing strategies tailored to local potential and needs. The program was implemented using a participatory empowerment approach involving various stakeholders, including the village government and local economic actors. The methods used included needs assessment, management and entrepreneurship training, intensive mentoring, and collaborative business planning. The program's results demonstrated significant improvements in BUMDes organizational governance, administrative professionalism, and a more organized and accountable financial reporting system. Furthermore, business unit diversification, local product quality improvement, and community capacity to utilize digital technology for marketing activities increased. The program also provided academic contributions in the form of empirical data and an applicable model of village empowerment based on Islamic economics. Overall, empowerment based on participation and Islamic economic values has been proven to promote sustainable village economic resilience and independence.

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta mengembangkan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Padangan melalui peningkatan kemampuan manajerial, inovasi usaha, dan penguatan strategi pemasaran digital yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan pelaku ekonomi lokal. Metode yang digunakan meliputi asesmen kebutuhan, pelatihan manajemen dan kewirausahaan, pendampingan intensif, serta perencanaan usaha secara kolaboratif. Hasil program menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tata kelola organisasi BUMDes, profesionalisme administrasi, serta sistem pelaporan keuangan yang lebih tertata dan akuntabel. Selain itu, terjadi diversifikasi unit usaha, peningkatan kualitas produk lokal, serta bertambahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan pemasaran. Program ini juga memberikan kontribusi akademik berupa data empiris dan model pemberdayaan desa berbasis ekonomi syariah yang aplikatif. Secara keseluruhan, pemberdayaan berbasis partisipasi dan nilai-nilai ekonomi Islam terbukti mampu mendorong ketahanan serta kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes; Ekonomi Desa; Ekonomi Syariah; Pemberdayaan Masyarakat; Potensi Lokal.

1. PENDAHULUAN

Isu dan Fokus Pemberdayaan

Hasil observasi lapangan, wawancara perangkat desa, dan kajian dokumen menunjukkan bahwa BUMDes Padangan menghadapi sejumlah isu strategis yang memerlukan intervensi pemberdayaan secara komprehensif. Kapasitas manajerial pengurus masih terbatas, terutama pada aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan tata kelola organisasi

berbasis akuntabilitas (Arifin & Sulaiman, 2021). Struktur organisasi yang ada belum berjalan optimal sehingga berdampak pada efektivitas pengembangan usaha desa. Selain itu, inovasi dan diversifikasi usaha masih lemah. Unit usaha BUMDes cenderung bersifat konvensional dan belum mampu menjawab dinamika kebutuhan pasar lokal (Astuti & Sari, 2020). Potensi ekonomi desa terutama sektor pertanian, peternakan, dan produk olahan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Literasi kewirausahaan masyarakat juga masih rendah, sejalan dengan temuan penelitian bahwa masyarakat perdesaan umumnya masih berorientasi pada sektor pertanian tradisional dan minim pemahaman mengenai konsep kewirausahaan modern (Kurniawan & Rahayu, 2019). Rendahnya pengetahuan tentang inovasi, manajemen risiko, dan keterampilan usaha menghambat terbentuknya aktivitas ekonomi produktif yang berkelanjutan. Akses pemasaran digital juga menjadi kendala. Produk BUMDes belum dipasarkan melalui platform digital secara optimal sehingga jangkauan pasar masih terbatas. Keterbatasan literasi digital ini umum dijumpai pada lembaga usaha desa (Aminullah & Rahmawati, 2022). Tanpa pemanfaatan teknologi digital, daya saing produk lokal sulit ditingkatkan.

Di samping itu, BUMDes Padangan belum memiliki kemitraan strategis yang kuat dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, maupun sektor swasta. Padahal, jejaring kemitraan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha desa melalui transfer pengetahuan, akses modal, dan perluasan pasar (Hendayana & Putra, 2021). Minimnya kolaborasi eksternal menjadi hambatan bagi akselerasi pertumbuhan usaha BUMDes. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian difokuskan pada empat aspek pemberdayaan: penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi kewirausahaan, digitalisasi pemasaran, dan penguatan jejaring kemitraan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan partisipasi aktif, pengembangan kapasitas, serta kemandirian lembaga lokal (Ife & Tesoriero, 2008).

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan unit usaha BUMDes Padangan agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajerial menjadi fokus utama, terutama terkait perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta tata kelola organisasi yang akuntabel (Arifin, Z., & Sulaiman, A. 2021). Penguatan inovasi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal dilakukan melalui pendampingan kewirausahaan (Astuti, W., & Sari, L. P. 2020). Sedangkan strategi pemasaran digital dikembangkan sebagai respon terhadap perubahan perilaku pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, penguatan jejaring kemitraan

strategis antara BUMDes, perguruan tinggi, dan pemerintah desa dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi desa. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan partisipatif (Ife, J., & Tesoriero, F. (2008).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi;

1. Bagi Masyarakat dan BUMDes, peningkatan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam mengelola unit usaha merupakan manfaat penting yang dihasilkan dari proses pendampingan. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal membuka peluang ekonomi baru dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi desa melalui inovasi dan produktivitas usaha.
2. Bagi Pemerintah Desa, BUMDes diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan desa yang efektif, sejalan dengan ketentuan pengelolaan BUMDes yang diatur dalam regulasi pemerintah. Kinerja BUMDes yang semakin akuntabel dan terstruktur memberikan kontribusi pada tata kelola pembangunan tingkat desa.
3. Bagi Perguruan Tinggi, program pengabdian ini mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui implementasi riset terapan yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Selain memperkuat jejaring akademik, kegiatan ini menyediakan data empiris untuk pengembangan penelitian dan publikasi.

Alasan Pemilihan Desa Dampingan

Desa Padangan memiliki sumber daya alam yang cukup besar, khususnya sektor pertanian dan peternakan. Namun, potensi tersebut belum terserap secara optimal akibat keterbatasan inovasi usaha (Astuti, W., & Sari, L. P. 2020). Upaya pendampingan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi desa melalui pengembangan unit usaha BUMDes. BUMDes Padangan telah berdiri lama, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penguatan tata kelola dan pengembangan unit usaha (Arifin & Sulaiman 2021). Hal ini menjadikan desa tersebut ideal untuk kegiatan pendampingan terstruktur.

Pemerintah desa menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan BUMDes, sedangkan masyarakat memiliki partisipasi aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi desa. Tingkat keterlibatan ini menjadi modal sosial penting dalam kegiatan pemberdayaan (Hendayana & Putra 2021). Desa Padangan memiliki karakter yang selaras dengan fokus penelitian dan pengabdian perguruan tinggi, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat, ekonomi syariah, dan kewirausahaan sosial (Freire, P. 2005). Lokasi desa yang mudah dijangkau dan memiliki infrastruktur memadai mendukung efektivitas pendampingan lapangan. Desa Padangan

berpotensi menjadi desa binaan jangka panjang untuk pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Kondisi Subjek Dampingan

Desa Padang dihuni masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil. BUMDes mengelola beberapa unit usaha, namun observasi awal menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen, inovasi produk, serta pemasaran digital (Aminullah, I., & Rahmawati, D. 2022). Intervensi pendampingan dirancang untuk menjawab kelemahan tersebut melalui pendekatan sistematis.

Output Pendampingan yang Diharapkan

Output dari pendampingan meliputi peningkatan kualitas kelembagaan, penyusunan SOP, penciptaan business plan, serta pengembangan produk unggulan desa. Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas kemasan merupakan bagian penting dalam penguatan daya saing produk lokal (Astuti & Sari 2020).

2. METODE PENDAMPINGAN

Strategi Pendampingan yang Diharapkan

Strategi pendampingan dalam kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan transformasi kapasitas dan keberlanjutan ekonomi bagi BUMDes Desa Padang. Pendekatan ini dilaksanakan melalui prinsip partisipatif, kolaboratif, aplikatif, dan berkelanjutan, serta mengacu pada model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal (*local-based empowerment model*) (Ife, J., & Tesoriero, F. 2008). Dengan penekanan pada transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi, dan kemandirian lembaga desa. Dengan menggunakan strategi pendampingan berbasis pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pengurus BUMDes sejak tahap perencanaan hingga evaluasi (Adi, I. R. 2013). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek kegiatan.

Implementasi strategi dilakukan melalui musyawarah desa, pemetaan potensi berbasis PRA (Participatory Rural Appraisal), dan integrasi aspirasi masyarakat dalam rencana kerja BUMDes (Chambers, R. 1994). Melalui pendekatan ini, masyarakat memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan. Strategi penguatan kapasitas (*capacity building*) dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, akuntansi dasar, workshop inovasi produk, simulasi digital marketing, dan konsultasi kelembagaan (Arifin, Z., & Sulaiman, A. 2021). Strategi ini diharapkan menghasilkan SDM BUMDes yang profesional, inovatif, dan

adaptif terhadap perubahan pasar.

Berikutnya strategi kolaboratif dilakukan dengan menekankan sinergi antara akademisi, pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan mitra eksternal, termasuk Dinas Koperasi dan lembaga keuangan lokal (Hendayana, R., & Putra, M. A. 2021). Implementasinya dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi lapangan antara pihak akademisi dan BUMDes, Kolaborasi riset terapan mengenai potensi ekonomi desa, Penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi desa berbasis data empiris. Strategi kolaboratif ini memastikan bahwa pendampingan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi juga menciptakan jaringan kemitraan jangka panjang. Berikutnya dengan strategi inovasi dan diversifikasi usaha berfokus pada pengembangan ide usaha berdasarkan potensi lokal, analisis pasar, peningkatan kualitas kemasan, dan legalitas usaha (Sari, L. P., & Astuti, W. 2020). Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan unit usaha BUMDes yang berdaya saing tinggi dan memiliki orientasi pasar yang luas.

Langkah-Langkah dalam Pendampingan

Pendampingan dilakukan melalui tahapan *community development* yang mencakup persiapan, pemetaan potensi, pelatihan, implementasi, dan evaluasi (Anwas, O. M. 2013). Tahap persiapan mencakup analisis situasi awal (*needs assessment*), koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan rencana kegiatan, dan sosialisasi program kepada masyarakat (Kurniawan, A., & Rahayu, E. 2019). Output dari tahap ini adalah dokumen rencana pendampingan dan peta potensi usaha desa (*village business mapping*).

Pada tahap berikutnya yaitu tahap pemetaan potensi, dilakukan survei lapangan, penyusunan profil ekonomi desa, dan analisis SWOT untuk menentukan arah pengembangan unit usaha (Sutanto, A. 2020). Langkah-langkah kegiatan tersebut yaitu melakukan survei lapangan terkait potensi sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar lokal. Menyusun profil potensi ekonomi desa, termasuk produk unggulan yang memiliki nilai jual. Melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) terhadap unit usaha BUMDes. Menentukan jenis usaha prioritas yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis. Tahap ini menghasilkan rekomendasi strategis tentang arah pengembangan unit usaha BUMDes yang realistis dan berdaya saing. Kemudian tahap pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial melalui pelatihan manajemen usaha, digital marketing, tata kelola kelembagaan, dan etika bisnis syariah (Suryani, N., & Darmawan, R. 2020). Berikutnya yaitu tahap Tahap implementasi mencakup penyusunan business plan, monitoring operasional usaha, konsultasi teknis, dan penguatan kemitraan dengan UMKM dan lembaga keuangan syariah (Aminullah, I., & Rahmawati, D. 2022). Selanjutnya Tahap evaluasi dilakukan melalui evaluasi

formatif dan sumatif, refleksi bersama, serta penyusunan laporan hasil pendampingan (Creswell, J. W. 2014). Adapun langkah-langkah evaluasi tersebut meliputi evaluasi formatif selama kegiatan berlangsung untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, evaluasi sumatif pada akhir program untuk menilai hasil dan dampak pendampingan, refleksi bersama pengurus BUMDes dan pemerintah desa guna memperoleh pembelajaran (*lesson learned*) yang dapat menjadi dasar pengembangan selanjutnya, penyusunan laporan hasil pendampingan yang mencakup capaian, kendala, dan rekomendasi keberlanjutan. Outputnya adalah laporan evaluasi dan rekomendasi program tindak lanjut.

Pemilihan Subjek Dampingan

Pemilihan subjek dampingan merupakan tahap strategis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Subjek yang tepat akan menentukan efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan program pendampingan. Dalam konteks kegiatan ini, subjek dampingan yang dipilih adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Padangan beserta masyarakat pelaku ekonomi lokal di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada pertimbangan akademik, sosial, dan kelembagaan, yang dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Aspek Kelembagaan dan Legalitas BUMDes

BUMDes Padangan memiliki legalitas hukum sesuai UU Desa dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, dan membutuhkan penguatan manajerial serta tata kelola keuangan (Kementerian Desa PDTT 2021). Kondisi tersebut menjadikan pengurus BUMDes sebagai subjek utama yang tepat untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara intensif.

2. Aspek Kebutuhan Penguatan Kapasitas (*Capacity Needs*)

Observasi awal menunjukkan bahwa pengurus BUMDes dan pelaku usaha lokal membutuhkan peningkatan kompetensi manajerial, administrasi keuangan, inovasi produk, pemasaran digital, serta pemahaman ekonomi syariah (Astuti, W., & Sari, L. P. 2020). Kebutuhan inilah yang menjadi dasar pemilihan subjek dampingan, karena program pengabdian diarahkan untuk meningkatkan kompetensi praktis dan manajerial pengurus BUMDes agar mampu mengelola unit usaha secara profesional dan berkelanjutan.

3. Aspek Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta dukungan pemerintah desa menjadi faktor pendukung efektivitas pendampingan (Hendayana & Putra 2021). Pemerintah desa dan warga lokal secara aktif terlibat dalam kegiatan BUMDes, baik sebagai anggota, konsumen, maupun penyedia bahan baku usaha. Kesiapan sosial ini menjadikan masyarakat desa khususnya kelompok pelaku UMKM, petani, dan pemuda desa sebagai subjek

pendampingan tambahan yang penting. Dengan melibatkan mereka, program dapat menciptakan rantai ekonomi desa yang inklusif dan kolaboratif.

4. Aspek Potensi Ekonomi dan Akses Pasar

Subjek dipilih karena keterkaitannya dengan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, olahan pangan, serta peluang usaha berbasis kearifan lokal, sehingga penting untuk mendukung ekosistem usaha desa (Kurniawan & Rahayu 2019). Kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut menjadi bagian dari ekosistem usaha desa yang relevan untuk didampingi. Pendampingan ini membantu mereka terintegrasi ke dalam rantai usaha BUMDes, sehingga memperkuat posisi ekonomi desa secara menyeluruh.

4. HASIL DAMPAK PERUBAHAN

Hasil dan Dampak Perubahan dari Kegiatan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan BUMDes Padangan menghasilkan perubahan positif secara kelembagaan, ekonomi, sosial, maupun individual. Dampak ini mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas manajerial, produktivitas usaha, serta partisipasi masyarakat desa (Arifin, Z., & Sulaiman, A. 2021). Dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek (*output* langsung), tetapi juga menunjukkan arah perubahan berkelanjutan (*outcome* dan *impact*) yang mendukung kemandirian ekonomi desa.

1. Dampak terhadap Kelembagaan BUMDes

Pendampingan memperkuat struktur dan tata kelola kelembagaan BUMDes. Perubahan kelembagaan mencakup penyusunan AD/ART, pembagian tugas pengurus, pembentukan SOP pengelolaan usaha, dan peningkatan akuntabilitas keuangan melalui pelatihan pembukuan sederhana (Anwas, O. M. 2013). Perubahan ini menunjukkan pergeseran BUMDes dari lembaga yang bersifat administratif menuju entitas ekonomi desa yang profesional dan produktif. Selain itu, muncul inisiatif kelembagaan baru seperti pembentukan tim inovasi usaha dan pemasaran digital BUMDes.

2. Dampak terhadap Pengembangan Unit Usaha

Program pendampingan berdampak signifikan terhadap diversifikasi dan pengembangan unit usaha BUMDes. Hasilnya berupa munculnya ide usaha baru, peningkatan nilai ekonomi usaha yang sudah ada, inovasi dalam pengemasan produk, serta perluasan jejaring kemitraan dengan UMKM dan lembaga keuangan mikro (Sari, L. P., & Astuti, W. 2020).

⁴. Secara empiris, hal ini menunjukkan pergeseran paradigma usaha dari aktivitas ekonomi tradisional menuju kewirausahaan sosial berbasis pasar (Kumar, S. 2018).⁵

3. Dampak terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendampingan meningkatkan kualitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan pengurus BUMDes serta masyarakat. Di antaranya peningkatan kemampuan manajerial, pemahaman inovasi usaha, efisiensi produksi, pemasaran digital, serta tumbuhnya etika bisnis syariah berdasarkan nilai kejujuran dan kebermanfaatan sosial (Ife, J., & Tesoriero, F. 2008). Dengan demikian, pendampingan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk karakter kewirausahaan sosial yang berintegritas.

4. Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa

Secara sosial-ekonomi, kegiatan pendampingan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan beberapa pelaku usaha, memperkuat solidaritas ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai motor penggerak kesejahteraan desa (Kurniawan, A., & Rahayu, E. 2019). Secara sosial, pendampingan berhasil memperkuat kohesi komunitas desa dan menghidupkan kembali semangat kemandirian kolektif.

5. Dampak terhadap Relasi Akademik dan Pemerintahan Desa

Kegiatan pendampingan menciptakan hubungan kolaboratif jangka panjang antara STAI Darul Hikmah Tulungagung dan Pemerintah Desa Padangan. Dampaknya terbentuknya desa binaan akademik, hasil pendampingan digunakan sebagai rujukan kebijakan, serta lahir komitmen program lanjutan berupa pelatihan kewirausahaan digital dan penguatan tata kelola keuangan syariah (Saputra, D. 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah menciptakan jembatan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Diskusi Keilmuan

Dari perspektif ekonomi syariah, pengembangan unit usaha BUMDes selaras dengan prinsip al-‘adl, al-maslahah, dan ta‘awun yang menekankan keberlanjutan, keadilan, dan kemanfaatan sosial (Antonio, M. S. 2012). Hal ini selaras dengan konsep kewirausahaan sosial Islami (*Islamic Social Entrepreneurship*) yang menekankan keseimbangan antara *maqasid al-syari‘ah* dan tujuan ekonomi, yaitu terciptanya kesejahteraan bersama (*falah*). Pendampingan menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam pengelolaan desa melalui penerapan etika amanah, usaha halal, dan distribusi manfaat yang adil (Rahmawati, N. 2020). Dengan demikian, kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan ekonomi desa dapat menjadi instrumen penerapan ekonomi Islam secara kontekstual. Dari perspektif manajemen dan kewirausahaan, pendampingan mencerminkan implementasi teori manajemen strategis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengurus BUMDes mulai mengembangkan business plan, analisis SWOT, SOP organisasi, dan

sistem pelaporan berkala (Robbins, S. P., & Coulter, M. 2016). Pendampingan membantu BUMDes Padangan menerapkan prinsip perencanaan (*planning*): menyusun visi usaha, analisis *SWOT*, dan business plan, pengorganisasian (*organizing*): membentuk struktur pengurus dan tim kerja, pelaksanaan (*actuating*): menjalankan usaha berdasarkan rencana kerja dan SOP. Pengawasan (*controlling*) yaitu melakukan evaluasi dan laporan keuangan secara periodik Prinsip entrepreneurial management tampak melalui kemampuan mengenali peluang usaha, inovasi produk, dan pembangunan jejaring kemitraan desa (Hisrich, R., Peters, M., & Shepherd, D. 2017). Dengan demikian, BUMDes mulai bertransformasi dari lembaga pasif menjadi lembaga yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pasar.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pengembangan unit usaha BUMDes Desa Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajerial BUMDes Padangan. Melalui pelatihan dan pendampingan manajemen usaha, pengurus BUMDes kini memiliki pemahaman yang lebih baik terkait perencanaan, administrasi, serta tata kelola keuangan berbasis transparansi dan akuntabilitas.
2. Inovasi dan diversifikasi unit usaha BUMDes mulai tumbuh dan berkembang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat dan pengurus BUMDes mampu mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal menjadi produk unggulan desa yang bernilai jual, seperti produk olahan pertanian dan jasa layanan desa.
3. Digitalisasi pemasaran produk menjadi langkah transformasi baru bagi BUMDes. Pemanfaatan media sosial dan platform digital telah membuka akses pasar yang lebih luas serta memperkuat branding produk lokal desa.
4. Penerapan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap BUMDes, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha desa.
5. Kegiatan pengabdian memberikan dampak akademik dan sosial yang nyata. Secara akademik, kegiatan ini memperkaya model empiris pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal; secara sosial, kegiatan ini memperkuat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STAI Darul Hikmah Tulungagung dan LPPM atas dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Desa Padangan beserta perangkat desa yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengurus BUMDes Padangan dan masyarakat desa yang berpartisipasi aktif selama proses pendampingan. Terima kasih pula kepada mitra eksternal yang turut memberikan kontribusi dalam bentuk informasi, diskusi, maupun kerja sama selama program berlangsung. Penghargaan khusus diberikan kepada tim dosen pelaksana pengabdian yang telah bekerja sama secara profesional dalam menyusun materi, memberikan pelatihan, dan melaksanakan pendampingan di lapangan. Semoga kerja sama ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi BUMDes Padangan dan masyarakat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat*. Rajawali Pers.
- Aminullah, I., & Rahmawati, D. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan BUMDes. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Aminullah, I., & Rahmawati, D. (2022). Pendampingan BUMDes dalam penguatan usaha desa. *JPKM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Antonio, M. S. (2012). *Islamic microfinance and community empowerment*. Tazkia Press.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Arifin, Z., & Sulaiman, A. (2021). Penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.
- Astuti, W., & Sari, L. P. (2020). Strategi pengembangan BUMDes berbasis potensi lokal. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Hendayana, R., & Putra, M. A. (2021). Model kolaborasi desa dalam penguatan ekonomi lokal. *JIPM: Jurnal Ilmu Pemberdayaan Masyarakat*.
- Hendayana, R., & Putra, M. A. (2021). Model pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha BUMDes. *JIPM: Jurnal Ilmu Pemberdayaan Masyarakat*.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Kemendesa PDTT.
- Kumar, S. (2018). Social entrepreneurship and village enterprises. *Rural Development Studies*.
- Kurniawan, A., & Rahayu, E. (2019). Dampak pemberdayaan ekonomi desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *JPEL: Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*.
- Kurniawan, A., & Rahayu, E. (2019). Optimalisasi peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*.
- Kurniawan, A., & Rahayu, E. (2019). Perencanaan pemberdayaan masyarakat desa. *JPEL: Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*.
- Rahmawati, N. (2020). Etika bisnis syariah dalam usaha desa. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Pearson Education.
- Saputra, D. (2021). Kolaborasi akademik dan desa dalam program pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Desa*.

- Sari, L. P., & Astuti, W. (2020). Inovasi usaha desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Ekonomi Desa*.
- Suryani, N., & Darmawan, R. (2020). Pelatihan inovasi dan digital marketing untuk penguatan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi Digital*.
- Sutanto, A. (2020). Analisis SWOT dalam perencanaan usaha desa. *Jurnal Pengembangan Desa*.